

NO	NAMA	NIM	JUDUL	RUMUSAN MASALAH	ORISINALITAS	KELAYAKAN	KETERANGAN	Dosen Pembimbing
1	Xaverius Leonardo	2010-41-072	Penerapan Proses Pemberian Marga dalam Perkawinan Beda Suku (Exogami) berdasarkan Adat Batak Toba (studi kasus: Perkawinan antara Yeremia dengan Yunita Panjaitan pada tanggal 21 Juni 2013)	1. Bagaimanakah proses pemberian marga dalam perkawinan beda suku (Exogami) berdasarkan Adat Batak Toba ?	v			Fokky Fuad
				2. Bagaimanakah penerapan proses pemberian marga dalam perkawinan beda suku (Exogami) di dalam masyarakat adat batak toba berdasarkan perkawinan antara Yeremia dengan Yunita Panjaitan pada tanggal 21 Juni 2013 ?				
				3. Apa sanksi yang diterapkan terhadap pelanggaran adat tersebut?				
2	Teguh Pratama Albasir	2009-41-073	Perbandingan Kewenangan DPR dalam pemilihan Hakim Agung sebelum dan sesudah putusan MK nomor 27/PUU-XI/2013	1. Bagaimana kewenangan DPR dalam melakukan pemilihan Hakim Agung sebelum putusan MK?	v			Joko Windarto
				2. Bagaimana kewenangan DPR dalam melakukan pemilihan Hakim Agung pasca putusan MK nomor 27/PUU-XI/2013?				
3	Rudi Budiman	2011-41-178	Tindak Pidana Pengedar Narkotika Menurut Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 (studi kasus nomor 229/Pid.Sus/2013/PT.BDG)	1. Apakah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah tepat di terapkan bagi para pelaku dan pengguna Narkotika dalam kasus putusan perkara (studi kasus nomor 229/Pid.Sus/2013/PT.BDG) ?	v			Nugraha (sudah bimbingan bab 3)
				2. Apakah putusan pengadilan negeri Bandung sudah sesuai dengan hukum positif ?				
4	Luqman Darwis	2010-41-165	Fungsi Controlled Delivery dalam Tindak Pidana penyelundupan Narkotika (studi Kasus di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai tipe Pratama Kantor Pos Pasar Baru)	1. Bagaimana modus operandi tindak pidana penyelundupan narkotika melalui Kantor Pos Pasar Baru?	V			Ahmad Sofyan
				2. Apa fungsi Controlled Delivery yang dilakukan Pejabat bea dan cukai terhadap tindak pidana penyelundupan narkotika melalui kantor pos Pasar baru?				

NO	NAMA	NIM	JUDUL	RUMUSAN MASALAH	ORISINALITAS	KELAYAKAN	KETERANGAN	Dosen Pembimbing
				3. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk mengurangi tindak pidana penyelundupan narkoba melalui kiriman pos?				
5	Rifki Ariwiguna	2010-41-074	Analisa Putusan tentang penjatuhan pidana perkara narkoba yang tidak disertakan barang bukti ganja dikaitkan dengan pasal 111 ayat (1) jo. Psal 132 ayat (1) Undang undang nomor 35 tahun 2009 (studi kasus putusan nomor 108/pid/b/2010/PN.BDG)	1. Bagaimana mekanisme sistem pembuktian menurut Undang undang Nomor 8 tahun 1981 KUHAP dikaitkan dengan Putusan nomor 108/pid/b/2010/PN.BDG ? 2. Bagaimana keabsahan putusan hakim dalam pembuktian kesalahan terdakwa dimana barang bukti ganja tersebut tidak ada terkait dengan putusan 108/pid/b/2010/PN.BDG?	V			Nugraha
6	Tirta Rezza	2009-41-031	Analisa Putusan Mahkamah Konstitusi (Tentang Pemilu Serentak) Dikaitkan Dengan Undang - Undang Dasar 1945 Pasal 22E (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Konstitusi Dengan Nomor Perkara: No. 14/PUU/XI/2013).	1. Apakah pemilihan di Indonesia pada saat ini Konstitusional atau Inkonstitusional ? 2. Apa yang menjadi dasar atau pertimbangan Mahkamah Konstitusional dalam memutus menyelenggarakan pemilu serentak dengan No. Perkara: 14/PUU/XI/2013 ?	V			Wasis Susetio
7	Nurul Arifiany	2010-41-061	Analisa Yuridis Terhadap Lemahnya Sistem Pemungutan Pajak di Indonesi ditinjau dari Undang-undang No. 28 Th. 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan	1. Bagaimana penerapan sistem self assesment ini sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku? 2. Apakah pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak terhadap wajib pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku?	V			
			Analisis Yuridis Tindak Pidana Penadahan (Studi Kasus Put. Nomor 127/PID.B/2012/PN.TNG)	1. apakah hakim pengadilan negeri Tangerang dalam putusan No. telah menerapkan hukum dengan benar? 2. Bagaimana pengaturan tindak pidana penadahan dalam hukum positif di Indonesia?				
			Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Pengulangan Tindak Pidana (Residivis) Narkoba	1. Apa pandangan secara kriminologi terhadap pelaku pengulangan tindak pidana (residivis) narkoba?				

NO	NAMA	NIM	JUDUL	RUMUSAN MASALAH	ORISINALITAS	KELAYAKAN	KETERANGAN	Dosen Pembimbing
8	Doan Abisier D. Sinaga	2010-41-108	(Residivis) Narkotika Menurut Aspek Kriminologi (Studi Kasus Put. Nomor 2510 K/PID.SUS/2011)	2. Bagaimana pemberlakuan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika?	V			
			Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dikaitkan dengan Peraturan Perundang-undangan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	1. bagaimana transparansi pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah? 2. Bagaimana pertanggungjawaban aparaturnegara apabila terjadi tindakan penyelewengan barang dan jasa berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?	V			
9	Sri Novalia	2009-41-189	Keabsahan Putusan Hakim Terhadap Perceraian (Studi Kasus Put. Nomor 1763/Pdt.G/2013/PA.TGRS)	1. Apa dasar pertimbangan hakim memutuskan perkara Nomor 1763/Pdt.G/2013/PA.TGRS tersebut telah sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan?				
				2. Apa dasar putusan perkawinan tersebut sudah berdasarkan hukum Islam, dimana disebutkan dalam kompilasi hukum Islam pasal 131 ayat (4): "Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang ijin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh, sementara sampai hari ini suami Afriansyah tidak pernah diperintahkan hakim untuk membacakan ikrar talak di hadapan istri dan kuasa hukumnya?				
			Analisis Yuridis Tindak Pidana <i>Insider Trading</i> di Bidang Pasar Modal sebagai <i>Predicate Crime</i>	1. Bagaimanakah hambatan dalam pembuktian tindak pidana <i>Insider Trading</i> di bidang pasar modal sebagai <i>Predicate Crime on Money Laundering</i> ?	V		Lampirkan Kasus	

NO	NAMA	NIM	JUDUL	RUMUSAN MASALAH	ORISINALITAS	KELAYAKAN	KETERANGAN	Dosen Pembimbing
10	Devi Erlia Susanty	2010-41-084	<i>on Money Laundering</i>	2. Bagaimanakah penanggulangan tindak pidana <i>Insider Trading</i> di bidang pasar modal melalui penegakan hukum <i>Money Laundering</i> ?				
			Analisis Yuridis Terhadap Perusahaan yang Menginstruksikan Pekerja Membawa Peralatan Kerja Milik Pribadi Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus pada PT. Citra Tirta Mulia Finance, Cabang Tangerang)	1. bagaimanakah implementasi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam praktik penerapan peraturan pekerja/buruh membawa peralatan kerja milik pribadi untuk dapat menunjang pekerjaan pekerja/buruh pada perusahaan? 2. bagaimanakah peran pemerintah dalam menerapkan sanksi hukum kepada perusahaan yang menginstruksikan pekerja/buruh yang membawa peralatan milik pribadi tanpa adanya jaminan perlindungan asset pribadi pekerja/buruh yang digunakan untuk menunjang pekerjaan pekerja/buruh tersebut?				
11	Irfan Nugraha	2009-41-082	Tinjauan Yuridis Terhadap Penerbitan Sertifikat Tanpa Hak Oleh BPN (Studi kasus : Putusan Mahkamah Agung No.364K/TUN/2012	1. Bagaimana mekanisme penerbitan sertifikat hak atas tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertahanan Nasional ?			Sudah ada	
				2. Apakah penerbitan sertifikat hak milik (sementara) nomor 389 C 911 persi 32 atas nama UMAR THOEFUR ABDUL AZIS dalam perkara nomor register 364K/TUN/2012 telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ?				
				3. Apakah leter C no. 259 atas nama AHIR BIN ATJAN dapat menjadi bukti kepemilikan hak atas yang sah ?				
12	Cahyo Nur Indra Guna	2009-41-123	Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pasien Yang Dirugikan Oleh Ahli Pengobatan Alternatif Tradisional.	1. Pertanggung Jawaban pidana ahli pengobatan alternatif tradisional terhadap perbuatan yang merugikan pasien?				Nugraha Abdulkadir, S.H, M.H
				2. Perspektif keberadaan Pasal-pasal dari KUHP yang digunakan untuk menjerat ahli pengobatan alternatif tradisional yang merugikan pasien?				

NO	NAMA	NIM	JUDUL	RUMUSAN MASALAH	ORISINALITAS	KELAYAKAN	KETERANGAN	Dosen Pembimbing
13	Ramandha Wahyuaksara	2010-41-016	Implementasi Rehabilitasi Pecandu Narkotika dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai Upaya Non Penal Badan Narkotika Nasional (Studi Kasus di Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta)	1. Bagaimana implementasi rehabilitasi pecandu narkotika dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai upaya non penal Badan Narkotika Nasional?			pilih kasus tertentu	
				2. Bagaimana mekanisme Badan Narkotika Nasional dalam penanganan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika?				
14	Tysna Novianty	2010-41-021	Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Psikotropika di Wilayah Hukum Polsekta Ciledug	1. Bagaimanakah penyalahgunaan psikotropika yang dilakukan remaja di wilayah hukum Polsekta Ciledug?			umum	
				2. Bagaimanakah cara penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan psikotropika yang dilakukan remaja di wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kota Ciledug?				
			Penyalahgunaan Kadar Zat Pewarna dan Zat Kimia Formalin Dalam Memproduksi Tahu Dilihat dari Segi Undang-undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan	1. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap produsen tahu dilihat dari segi Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan pasal 21?	V		Permasalahan dibuat 2 point	
				2. Bagaimana dampak dari penggunaan zat pewarna dan zat kimia formalin terhadap konsumen dilihat dari segi Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 7 dan Pasal 8?				ade hari siswanto
				3. Bagaimana penerapan sanksi pidana Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 pasal 55b tentang pangan jika dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1996 tentang Kesehatan Pasal 21 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen pasal 7 dan 8?				
				1. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap produsen tahu dilihat dari segi Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan pasal 21?				

NO	NAMA	NIM	JUDUL	RUMUSAN MASALAH	ORISINALITAS	KELAYAKAN	KETERANGAN	Dosen Pembimbing
15	Benny Suratno	2009-41-186	Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Penggunaan Kadar Zat Kimia Pada Produksi Tahu Dilihat dari Segi Undang-undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan	2. Bagaimana dampak dari penggunaan zat pewarna dan zat kimia formalin terhadap konsumen dilihat dari segi Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 7 dan Pasal 8?				
				3. Bagaimana penerapan sanksi pidana Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 pasal 55b tentang pangan jika dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1996 tentang Kesehatan Pasal 21 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen pasal 7 dan 8?				
			Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Produsen Tahu Dalam Penggunaan Kadar Zat Pewarna dan Zat Kimia Formalin dari Segi Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 Pasal 21 tentang Kesehatan	1. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap produsen tahu dilihat dari segi Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan pasal 21?				
2. Bagaimana dampak dari penggunaan zat pewarna dan zat kimia formalin terhadap konsumen dilihat dari segi Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 7 dan Pasal 8?								
3. Bagaimana penerapan sanksi pidana Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 pasal 55b tentang pangan jika dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1996 tentang Kesehatan Pasal 21 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen pasal 7 dan 8?								
16	soni suhardiyansyah	2010-41-191	penerapan ajaran kausalitas dalam penyertaan terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak dibawah umur (study kasus putusan nomor:799/pid.B/2013/PN.BB)	1. bagaimana ajaran kausalitas bila diterapkan dalam pidana materi perkara pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak dibawah umur (putusan no.799/PID.B/2013/PN.BB)	V		sudah pernah diskusi dengan pak ahmad sofyan	
				2. bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap penyertaan dalam				AHMAD SOEVAN

NO	NAMA	NIM	JUDUL	RUMUSAN MASALAH	ORISINALITAS	KELAYAKAN	KETERANGAN	Dosen Pembimbing
				(putusan no :799/PID.B/2013/PN.BB)				
17	Minda Poppy Anggreini	2010-41-101	Analisis Putusan Dalam Tindak Pidana Desersi yang Dilakukan oleh Anggota TNI (Studi Kasus Putusan Pengadilan Militer 11-08 Jakarta Nomor 48-K/PM-11-08/AD/II/2011)	1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana desersi yang dilakukan oleh Anggota TNI dalam Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 48-K/PM II-08/AD/II/2011? 2. Bagaimana pengaturan tentang desersi ditinjau dari pasal 87 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer?	V			K.G. Wijaya
			Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Etnis yang Tidak Memiliki Kewarganegaraan (Studi Kasus: Etnis Rohingya di Myanmar)	1. Bagaimana perlindungan terhadap etnis yang tidak memiliki kewarganegaraan? 2. Bagaimana kedudukan orang-orang Rohingya yang keluar dari negara asal untuk mencari perlindungan?				
			Pencabutan Hak Atas Tanah Terlantar Ditinjau Dari Hukum Agraria	1. Sejauh mana pencabutan hak atas tanah untuk kepentingan umum? 2. Bagaimana pelaksanaan pembebasan hak atas tanah dapat dilakukan?				
18	Tommy Jefri Hanter	2010-41-171	Tinjauan Yuridis Kerjasama Pemerintah Swasta Dalam Pengusahaan Bandar Udara di Indonesia	1. Apakah yang dimaksud dengan perusahaan Bandar Udara di Indonesia? 2. Bagaimanakah bentuk pengaturan dan kerjasama pemerintah swasta dalam perusahaan bandar udara di Indonesia?			Cari Judul Baru	
19	Riyandi Binsar Halomoan	2010-41-079	Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Kasus Kelalaian Pengemudi yang Menimbulkan Kecelakaan di Jalan Raya, Tinjauan Yuridis UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	1. Apa unsur-unsur kelalaian pengemudi yang bisa dipidana? 2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pengemudi kendaraan karena kelalaiannya dalam kecelakaan lalu lintas?	Sudah Ada			
				1. Bagaimana kasus antara PT. Carrefour				

NO	NAMA	NIM	JUDUL	RUMUSAN MASALAH	ORISINALITAS	KELAYAKAN	KETERANGAN	Dosen Pembimbing
20	Rina Evita Royhana	2010-41-179	Urgensi Keberadaan Undang-undang Ritel di Indonesia, Berkaca Pada Kasus PT. Carrefour Indonesia Melawan Komite Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)	Indonesia melawan Komite Pengawas Persaingan Usaha dapat terjadi?	V		Judl Direvis	I Gede Hartadi
				2. Kewenangan Komite Pengawas Persaingan Usaha menurut UU No. 5 Tahun 1999?				
				3. Seberapa penting keberadaan UU Ritel dalam melindungi pelaku usaha ritel kecil dan demi mendukung perekonomian Indonesia?				
21	Edison Ramli	2010-41-166	Perkawinan Sesuku Dalam Hukum Adat Sungai Asam Padang-Pariaman	1. Bagaimanakah konsep perkawinan dalam Hukum Adat Padang-Pariaman?	Sudah Pernah			
				2. Bagaimana peran Ketua Pemuka dalam hal mengatasi perkawinan sesuku?				
				3. Bagaimana sanksi yang timbul dalam hal terjadinya perkawinan dalam satu suku yang sama?				
22	Suhandy	2009-41-165	Dualisme Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (studi kasus putusan Mahkamah Agung No. 659.K/Pdt.Sus/2012 tanggal 26 Maret 2013)	1. Mengapa terdapat dualisme sifat putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?			pernah diskusi dengan beliau	Ade Hari Siswanto, S.H., M.H
				2. Bagaimana penerapan dualisme sifat putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 659K/Pdt.Sus/2012 tanggal 26 Maret 2013?				
23	Lilis Rusmaya	2010-41-110	Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Putusan No. 671/Pid.B/2012/PN.JKT.PST)	1. Bagaimana pandangan hukum pidana terhadap tindak pidana pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan?				
				2. Bagaimana analisa hukum pidana terhadap putusan pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 671/Pid.B/2012/PN.JKT.PST dalam masalah tindak pidana pemalsuan surat?				

NO	NAMA	NIM	JUDUL	RUMUSAN MASALAH	ORISINALITAS	KELAYAKAN	KETERANGAN	Dosen Pembimbing
24	Katlin Carolina	2010-41-096	Pemenuhan Kebutuhan Biologis (Seksual) Terhadap Narapidana dalam Lembaga Perasyarakatan Pria Kelas 1 Tangerang	1. Bagaimanakah cara narapidana memenuhi atau mendapatkan kebutuhan seksual secara wajar/normal selama menjalani masa pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Tangerang?				
				2. Kondisi apakah yang dapat mempengaruhi pemenuhan kebutuhan seksual bagi narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Tangerang?				
25	Agus	2009-41-182	Implementasi Perda Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2013 tentang iklan Visual terhadap politik liar	1. Apakah iklan politik yang saat ini banyak ditemukan di seluruh kota tangeran telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Perda nomor 7 tahun 2013 ?	V			Wasis Susetio
				2. Apakah sanksi yang seharusnya diberikan kepada calon anggota legislatif atau partai politik atau bakal calon presiden yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap perda nomor 7 tahun 2013 tentang iklan visual ?				
26	Najiullah	2010-41-128	Kewajiban Pendaftaran Kartu Tanda Penduduk Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006	1. Apa hambatan-hambatan yang dialami penduduk dalam memenuhi kewajiban pendaftaran Kartu Tanda Penduduk sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006?				
				2. Bagaimana penerapan sanksi di dalam praktiknya apabila ada penduduk Indonesia yang tidak memenuhi pendaftaran Kartu Tanda Penduduk sesuai dengan Undang-undang Nomor				
			Tinjauan Yuridis Kriminologi Keberadaan Juru Parkir Tidak Resmi di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dihubungkan Dengan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran	1. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya juru parkir di DKI Jakarta?	V		Harus Ada Kasus	Nugraha
				2. Bagaimana efektifitas peraturan daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang perparkiran?				
			Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Penentuan Hak	1. Bagaimana dampak perceraian terhadap anak yang menjadi korban akibat perceraian anaknya?				

NO	NAMA	NIM	JUDUL	RUMUSAN MASALAH	ORISINALITAS	KELAYAKAN	KETERANGAN	Dosen Pembimbing
27	Yopi Irawan Arjuna W	2010-41-134	Perwalian Anak di Bawah Umur sebagai Akibat dari Perceraian (Put. No. 524 K/AG/2012)	2. Bagaimana praktek pelaksanaan penentuan perwalian anak di bawah umur akibat dari perceraian orang tua ditinjau dari UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU Kompilasi Hukum Islam, dan UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak?				
			Tinjauan Yuridis Tentang Perlindungan Konsumen sebagai Pasien Jasa Pelayanan Medis (Put. No. 822 K/PID/SUS/2010)	1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pasien yang dirugikan oleh jasa pelayanan medis ditinjau dari UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan UU Nomor 40 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit? 2. Bagaimana upaya hukum yang harus dilakukan oleh pasien atas kerugian yang dialami sebagai konsumen jasa pelayanan medis?	V			Agung Nugroho
28	Riska Komara	2009-41-174	Pelaksanaan Pembagian Hukum Kewarisan Masyarakat Hukum Kampung Naga di Pandang dari Hukum Islam	1. Bagaimana pelaksanaan hukum warisan di masyarakat adat Kampung Naga Desa Neglasari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya? 2. Bagaimana pandangan dari hukum Islam terhadap pelaksanaan pembagian hukum kewarisan dalam masyarakat adat Kampung Naga Desa Neglasari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya?	V			
29	Dio Tatagama	2010-41-075	Penegakan Hukum pada Sekolah Kedinasan (Studi Kasus IPDN Jatinangor)	1. Mengapa penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya di IPDN? 2. Bagaimana cara melaksanakan penegakkan hukum di sekolah kedinasan?				
			Pertanggungjawaban Pidana Pilot (Kapten Terbang) Atas Terjadinya Kecelakaan Pesawat Udara	1. perbuatan-perbuatan apakah yang termasuk dalam lingkup tindak pidana di bidang penerbangan menurut UU No 1 Tahun 2009? 2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pilot dalam kecelakaan pesawat udara ditinjau dari UU No 1 Tahun 2009?				
			Tinjauan Kriminologi Terhadap Fungsi Patroli Polisi Dalam Penanggulangan Suatu Tindak Kejahatan	1. Bagaimanakah bentuk-bentuk patroli yang dilaksanakan oleh aparat kepolisian sebagai salah satu usaha dalam penanggulangan tindak kejahatan? 2. Sejauh manakah peranan dan tanggungjawab POLRI dalam menanggulangi suatu tindak kejahatan?	V		Judul Dispecificasi	Nugraha

NO	NAMA	NIM	JUDUL	RUMUSAN MASALAH	ORISINALITAS	KELAYAKAN	KETERANGAN	Dosen Pembimbing
				3. Apa hambatan-hambatan yang dihadapi POLRI dalam melakukan fungsi patroli di masyarakat?				
30	Firmansyah	2010-41-173	Penyelesaian Sewa Menyewa Tanah dengan Cara Mediasi di Pengadilan (Put. Pengd. Nomor 179/Pdt.G/2011/PN.TNG)	1. Bagaimana mediasi di pengadilan berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang "Prosedur Mediasi di Pengadilan"? 2. Bagaimana penyelesaian sengketa sewa menyewa tanah dengan cara mediasi di pengadilan?	V			
31	Daud Lambert	2007-41-134	Perdagangan anak dari segi analisis hukum pidana	1. Bagaimana modus Perdagangan anak ? 2. Bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan anak ?				
			Pertanggung jawaban pemilik senjata api legal yang disalahgunakan oleh orang lain	1. Apakah setiap orang bisa mengajukan permohonan kepemilikan senjata api ? 2. Bagaimanakah pertanggung jawaban pidana pemilik senjata api legal dan pihak lain yang melakukan penyalahgunaan senjata api miliknya ?	V			
			Kekerasan seksual yang dilakukan suami terhadap istrinya	1. Apakah faktor-faktor penyebab kekerasan yang dilakukan suami terhadap istrinya ? 2. Apakah kekerasan seksual yang dilakukan suami pada istrinya dapat dianggap sebagai bentuk pemerkosaan dalam rumah tangga (marital rape) ? 3. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual dalam rumah tangga yang dilakukan suami pada istrinya ?				